

Development of Educational Infrastructure in Relocating the State Capital in Indonesia

Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Dalam Pemindahan Ibukota Negara Di Indonesia

Muh. Nur Rochim Maksum^{1*}, Deddy Ramdhani², Meti Fatimah³, Athia Tamyizatun Nisa⁴

¹Departement of Islamic Religius Education in Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta 57102, Jawa Tengah, Indonesia.

²Departement of Islamic Religius Education in Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram 83116, NTB, Indonesia.

³Departemen of Islamic Religius Education in Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Indonesia.

⁴Department of Usuludin and Dakwah in Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Indonesia.

Email: mnr127@ums.ac.id^{1*}, deddyramdhani@uinmataram.ac.id², fatimahcan@gmail.com³, athiatamyizatun@gmail.com⁴,

ABSTRACT

The discussion about IKN is generally dominated by government infrastructure planning. There has been no more detailed discourse on how to build the educational infrastructure. Whereas in its history, the capital has played an important role in developing education. This paper uses a literature approach, with the method of description and analysis. The results of the discussion are that 1) moving the capital is a common thing in history, but there are differences in social context between the past and the present, 2) Infrastructure development usually follows the needs of the community, 3) The need for educational infrastructure must be provided at the age of compulsory education at the location IKN, 4) Educational infrastructure is not only carried out by the Government, but must cooperate with private educational institutions, both public and religious.

Keywords: Relocation of the Capital City, IKN, Infrastructure

ABSTRAK

Perbincangan tentang IKN pada umumnya didominasi oleh perencanaan infrastruktur pemerintahan. Belum ada wacana yang lebih mendetail bagaimana membangun infrastruktur pendidikannya. Padahal dalam sejarahnya, ibukota memiliki peran penting dalam mengembangkan pendidikan. Tulisan ini menggunakan pendekatan kepustakaan, dengan metode deskripsi dan analisa. Hasil dari pembahasan adalah bahwa 1) pemindahan ibukota merupakan hal biasa dalam sejarah, tetapi terdapat perbedaan konteks sosial antara masa lampau dengan masa kini, 2) Pembangunan infrastruktur biasanya mengikuti kebutuhan masyarakat, 3) Kebutuhan infrastruktur pendidikan harus disediakan sebesar angka usia wajib belajar di lokasi IKN, 4) Infrastruktur pendidikan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, melainkan harus bekerjasama dengan pihak lembaga pendidikan swasta, baik umum atau keagamaan.

Kata Kunci: Pemindahan Ibukota, IKN, Infrastruktur

PENDAHULUAN

Undang-undang tentang IKN telah ditetapkan oleh Presiden dan DPR. Ini artinya, secara *de jure*, ibukota Indonesia resmi berpindah ke Kalimantan Timur pada semester pertama

tahun 2024 (Permana 2021). Tetapi secara *de facto*, Jakarta masih menjadi pusat pemerintahan, sekaligus sebagai pusat ekonomi di Indonesia, mengingat besarnya jumlah perputaran uang di DKI.

Perbincangan tentang ibukota menjadi trending topic selama berbulan-bulan. Mengingat pentingnya permasalahan pindah ibukota ini, serta pengaruhnya terhadap perjalanan bangsa ke depannya. Beberapa ketakutan mungkin muncul, karena prediksi ke depan masih belum ada kepastian. Termasuk dalam prediksi besaran anggaran untuk pembangunan ibukota yang tidak sesuai dengan rencana awal. Dari rencana semula sebesar 19,2% dari APBN menjadi 53,5% (Sembiring 2022).

Topik yang menjadi obyek pembicaraan kebanyakan pada sekitar masalah infrastruktur. Yaitu tentang gedung-gedung yang akan menjadi kantor pemerintahan. Atau pembangunan akses jalan di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Termasuk perbincangan tentang bagaimana membuat saluran air yang memungkinkan pencegahan terhadap bencana banjir, serta penyediaan air bersih bagi para calon penghuni IKN (Ibukota Negara).

Obyek yang sering dilupakan adalah pengembangan SDM. Karena diperkirakan akan adanya penempatan ratusan ribu anggota TNI/Polri/ PNS menuju Ibukota Negara baru. Sehingga semua hal yang terkait dengan kebutuhan TNI/Polri/ PNS harus dipenuhi. Berdasarkan survey sebagian besar para PNS masih merasa enggan untuk ditempatkan di wilayah ini. Mengingat wilayah ini belum memiliki infrastruktur yang kompleks. Termasuk belum adanya sarana perbelanjaan, ruang publik, taman, tempat wisata, tata kota yang masih belum jelas, property yang belum bisa dilihat, dan sebagainya.

Salah satu hal yang dilewatkan adalah sarana pendidikan. Karena 500 ribu PNS yang ditempatkan pasti membawa keluarga, yang terdiri dari pasangan dan anak-anak mereka (Indraini 2022). Anak usia 6 sampai 18 tahun membutuhkan pendidikan, yang biasanya diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal. Untuk memenuhi sarana pendidikan ini, wilayah yang akan dijadikan kawasan ibukota belum bisa memenuhi ekspektasi dari kebutuhan PNS yang umumnya berasal dari luar pulau (terutama Jawa) yang mempunyai harapan akan kualitas pendidikan yang baik bagi para putranya.

Pada umumnya PNS memiliki gaji di atas rata-rata. Mereka mengeluarkan anggaran yang relatif tinggi bagi pendidikan putra-putri mereka. Mereka mengharapkan agar anak mereka memiliki kemampuan yang setidaknya sama dengan orangtua mereka. Sehingga mampu melanjutkan estafet kehidupan yang sepadan atau lebih baik daripada orangtuanya. Karena pembangunan ibukota masih dalam tahap perencanaan dan penataan, maka belum diperoleh gambaran detail bagaimana infrastruktur pendidikan yang akan diselenggarakan. Tetapi, dalam perjalanan sejarah, terlihat bagaimana pemindahan kekuasaan selalu tidak melupakan unsur pengembangan pendidikan, walaupun tidak sama baik model maupun metode yang digunakannya sebagaimana saat ini.

Pertanyaannya yang akan dijawab dalam makalah ini adalah bagaimana pemindahan ibukota di masa lampau? Apa perbedaannya dengan pemindahan ibukota sekarang? Bagaimana mereka menyediakan kebutuhan akan sarana pendidikan? Berapa besar kebutuhan gedung sekolah dan ketersediaan yang dikerjakan disana dalam jumlah yang layak? Bagaimana dengan pembangunan sarana pendidikan agama dan madrasah di IKN? Pertanyaan-pertanyaan tersebut berusaha akan dijawab dalam tulisan ini.

METODOLOGI

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian pustaka atau library research. Untuk mengali data berkaitan tentang permasalahan infrastruktur pendidikan maka peneliti menggunakan berbagai sumber kepustakaan, baik berupa jurnal, buku, website, dan pemberitaan. Pembahasan tentang ibukota saat ini bersifat sangat dinamis dan selalu berkembang seiring dengan waktu, sehingga banyak akademisi yang merujuk sumber informasi pada pemberitaan media di website-website resmi mereka.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Deskripsi adalah menggambarkan obyek pembahasan dengan kata-kata tertulis dan tertata, sehingga gambaran obyek mudah ditangkap oleh pembaca. Sedangkan analisa adalah menguraikan obyek kepada bagian-bagiannya, sehingga dapat menjawab pertanyaan pertanyaan dari pokok pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Pemindahan Pusat Kekuasaan & Infrastruktur Pendidikannya

a. Pergantian Pusat Kekhalifahan Islam

Pergantian kekuasaan adalah hal yang umum dalam sejarah, termasuk dalam sejarah Islam. Sejarah Islam mencatat terjadi perpindahan pusat kekhalifahan dari Madinah ke Kufah di zaman Khalifah Ali Ibn Abi Thalib. Kemudian, pada masa Dinasti Umayyah berpindah ke Damaskus. Kemudian setelah masa Abbasiyah memindahkan ibukota, dari Damaskus, ke wilayah Baghdad. (Zakariya 2018:22)

Semua perpindahan itu didasarkan atas keamanan dan stabilitas pemerintahan. Seperti perpindahan dari Madinah menuju Kufah oleh Ali, karena merasa kota Madinah tak lagi aman menjadi pusat pemerintahan. Terutama setelah terbunuhnya Khalifah Utsman Ibn Affan yang telah memerintah selama 12 tahun. Ketidakpuasan terhadap penanganan kematian Utsman, menjadikan semakin kuatnya oposisi di Madinah. (Zakariya 2018:19)

Perpindahan dari Madinah ke Damaskus juga memiliki pertimbangan keamanan dari Mu'awiyah. Karena di Damaskus, mereka sudah memiliki banyak relasi yang kuat dan jauh dari pengaruh penentangannya di Madinah atau Makkah. Muawiyah sendiri sebelumnya ditunjuk oleh Utsman ibn affan, sebagai Gubernur di Suriah. Begitu juga dengan perpindahan dari Damaskus menuju Baghdad pada pemerintahan al Manshur juga memiliki pertimbangan stabilitas.

Perpindahan menuju Baghdad ini membawa cerita kesuksesan dan dapat dijadikan ibrah bagi keberhasilan pemindahan ibukota, terutama dari segi kemajuan pendidikan. Sebagaimana diketahui, kemajuan ilmu pengetahuan dalam islam, justru terjadi ketika sesudah perpindahan ibukota. Perpindahan menuju Baghdad, melahirkan banyak intelektual serta kitab-kitab yang berisi ilmu pengetahuan. Dari kota Baghdad terlahir banyak teori yang masih dipakai bahkan hingga masa kini. Perkembangan di bidang matematika, filsafat dan logika, geografi, astronomi, sastra sampai ilmu fiqh, marak di Baghdad. (Zakariya 2018:23)

Kemajuan di bidang pendidikan juga dapat dilihat dari perpindahan ibukota Bani Umayyah. Yang sebelumnya di Damaskus, setelah dikalahkan oleh Dinasti Abbasiyah berpindah menuju Negara Spanyol. Di Cordoba mereka mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga lahir beberapa nama seperti Ibn Sina, Ibn Rusyd, dan lainnya. (Zakariya 2018:31)

Pergantian Pusat Kerajaan di Nusantara

Pergantian pusat pemerintahan juga terjadi di Nusantara. Seperti perpindahan dari wilayah Mataram (Yogyakarta) menuju Jawa Timur. Atau perpindahan pusat kekuasaan dari Demak menuju Pajang, dari Pajang menuju Kotagede – Yogyakarta, dari Kotagede menuju Plered- Bantul, dari Plered menuju Kartosura, dan dari Kartosura menuju Sala. Semua perpindahan pusat kekuasaan selalu berhubungan dengan stabilitas penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya.

Perpindahan dari wilayah mataram Hindu menuju Jawa Timur menurut sebagian ahli sejarah karena bencana. Sebagaimana diketahui, wilayah Mataram merupakan wilayah rawan terhadap bencana alam, baik dalam bentuk erupsi gunung merapi dari utara, atau gempa yang biasa berepisentrum di sebelah selatan. Teori tentang penyebab perpindahan kerajaan menuju kearah Timur karena erupsi Merapi di tahun 1006, masih menjadi kontroversi di kalangan sejarawan hingga kini. (Andreastuti 2006:201)

Perpindahan dari pusat pemerintahan Majapahit (Trowulan) menuju Demak juga memiliki alasan. Karena Adipati Demak, Raden Patah, memiliki support kuat para ulama (walisongo), dan bertempat di pesisir utara, yang memiliki basis santri yang kuat daripada daerah pedalaman. Kemudian oleh Jaka Tingkir (Sultan Hadiwijaya), setelah menaklukkan Adipati Jipang (Arya Penangsang), menjadikan Pajang sebagai pusat kekuasaannya. Karena dari wilayah ini lah basis kekuatannya berasal. (Usamah 2019:6)

Panembahan senopati setelah berhasil menaklukkan raden Hadiwijaya juga tidak membangun pusat kekuasaan di bekas pemerintahan sebelumnya (Pajang). Melainkan membangun pusat pemerintahan baru di Kotagede, karena di sini, ia dan ayahnya (Ki Ageng Pemanahan) telah melakukan babad alas di wilayah yang dikenal dengan alas mentaok. Pindahnya ibukota mataram Islam dari Kotagede menuju plered juga untuk menghindari dari pemberontakan Trunojoyo. Dari Plered menuju Kartosuro juga memiliki alasan yang sama. Sedangkan

perpindahan dari Kartosura menuju desa sala, juga sebagai upaya menghindari dari konflik yang diakibatkan oleh geger pecinan, yang sangat marak pada tahun 1740. (Kristiyanto and Yusuf 2019:147)

Pada masa itu belum memiliki model pendidikan yang baku sebagaimana yang dikenal saat ini. Walaupun pada waktu itu sudah berdiri pesantren, tetapi model pendidikan yang digunakan berbentuk halaqah, bukan system klasikal sebagaimana yang dikenal saat ini. Pada masa ini hanya mengenal beberapa sastra yang ditulis oleh para pujangga. Salah satunya adalah kitab babad tanah jawi, yang dipercaya ditulis oleh Panembahan Senopati pada abad ke 16. Pada umumnya waktu itu, model penulisan masih dalam bentuk pupuh, yang terdiri dari banyak bait, dan berkisah tentang mitologi. Tidak ditemukan kitab berisi ilmu pengetahuan sebagaimana dikenal saat ini.

Perkembangan pendidikan maju berkat kelembagaan yang didirikan oleh Belanda. Misalnya mendirikan lembaga bahasa jawa di Kota Surakarta pada tahun 1830, kemudian berdiri sekolah-sekolah klasikal pada masa politik liberal belanda dan kebijakan politik etis (Dewi and Saraswati 2019:97) . Dimana golongan ningrat dan elit kerajaan mendapatkan pendidikan yang setara dengan golongan eropa.

b. Pergantian Pusat Pemerintahan di Asia Tenggara Masa Modern

Negara modern berbeda dengan model Negara masa klasik. Negara modern memiliki ciri partisipasi public dalam pengambilan keputusan. Sehingga, mereka memiliki lembaga perwakilan (parlemen) yang relatif kuat. Sehingga keputusan terhadap segala sesuatu, tidak hanya ditentukan oleh keputusan eksekutif. Melainkan harus dikuatkan dengan persetujuan suara mayoritas di parlemen. Sehingga kebijakan Negara bersifat transparan dan didasarkan atas control sosial.(Bisri 2017:122)

Negara-negara di Asia Tenggara pada umumnya berbentuk Negara demokrasi. Kecuali brunei Darussalam, dimana kedudukan sultan, sangat kuat. Hal berbeda ditemukan di Negara lainnya. seperti Negara Malaysia, meskipun dikepalai oleh seorang Yang dipertuan Agung, tetapi ia tetap dipilih berdasarkan kesepakatan para raja di Sembilan kerajaan bagian untuk masa jabatan lima tahun secara bergilir. Mereka juga harus tunduk pada konstitusi yang berlaku di Negara Malaysia. (Bangun 2019:103)

Di masa modern, Negara Indonesia merupakan yang paling awal menerapkan perpindahan ibukota di Asia Tenggara. Yaitu ketika pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kota Yogyakarta pada tahun 1946. Setelah Perang Dunia II berakhir, maka Belanda di pihak pendukung sekutu, memenangkan PD II. Sehingga, mereka dengan mudah membonceng tentara sekutu, yang tiba di Indonesia dalam rangka membersihkan sisa-sisa kekuasaan jepang di Tanah Air.

Terror dan intimidasi dilakukan oleh tentara Belanda terhadap pejabat-pejabat di Jakarta. Hal ini yang menyebabkan pentingnya perpindahan ibukota di tempat yang lebih aman. Kemudian dipilih Kota Yogyakarta. Karena selain dianggap lebih aman, di Yogyakarta, mereka mendapatkan suntikan dana, untuk ‘menghidupi’ pemerintahan. Mereka belum memiliki kas sebagaimana sekarang (yang diatur oleh Kementerian Keuangan). Sehingga gaji presiden dan para menteri ditanggung oleh sultan Yogya. Yogyakarta pada masa itu juga memiliki perlengkapan yang memadai sebagai ibukota. Mereka menggunakan Gedung Agung sebagai Istana

Kepresidenan, menjadikan beberapa bagian milik keraton Kasultanan dan Pakualam sebagai tempat tinggal para anggota cabinet. Meskipun demikian, alasan pemindahan ibukota ini jelas berbeda dengan pemindahan ibukota sekarang ini.

Infrastruktur pendidikan di Kota Yogyakarta tergolong maju. Mereka sudah memiliki banyak lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan Muhammadiyah sudah berdiri sejak tahun 1912, disusul dengan lembaga pendidikan Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Lembaga zending juga mendirikan lembaga pendidikan di Kotabaru Yogyakarta. Yogyakarta juga sudah memiliki lembaga kepesantenan, seperti pesantren Krapyak ayng diasuh oleh KH Munawwir (dilanjutkan oleh KH Ali Maksum). Kota Yogyakarta juga memiliki SDM yang berlimpah, yang memungkinkan mereka mendirikan Perguruan Tertinggi tertua yang didirikan oleh Negara Republik Indonesia, yaitu UGM (Universitas Gadjah Mada). Sehingga, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan di Yogyakarta tidak menemukan kendala.

Negara di Asia Tenggara yang sudah melakukan pemindahan ibukota adalah Negara Malaysia. Negara Malaysia sudah merencanakan pemindahan ibukota ke Petrajaya sejak tahun 1995, dan resmi menjadi pusat pemerintahan pada tahun 1999. Luas kota Petrajaya 46 km² hampir sama dengan luas kota Surakarta (setara dengan 4.600 ha), tidak sebanding dengan Ibukota Negara (IKN) Nusantara yang seluas 180.000 ha. Jarak Petrajaya juga relatif dekat dengan Kuala Lumpur, hanya sekitar 25 km. berbeda dengan perpindahan dari Jakarta menuju IKN Nusantara. Setelah perpindahan, pertumbuhan penduduk di Kota ini mengalami pertumbuhan pesat. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan data antara tahun 2010 hingga 2020, yang bergerak dari angka 70 ribu jiwa menjadi 110 ribu jiwa. (Rahadian 2022) Jumlah ini jauh lebih rendah daripada Kota Solo dengan jumlah penduduk mencapai 575 ribu jiwa (2019).

Myanmar juga melakukan pemindahan ibukota. Pemindahan ini memiliki alasan yang sama dengan Negara Malaysia ataupun Indonesia, yaitu kemacetan. Pemindahan ini dilakukan oleh pemimpin militer Myanmar Than shew, dan meresmikannya sebagai ibukota pada tahun 2005. Dilihat dari jumlah penduduknya, Kota Naypyaw ini lebih besar daripada kota Solo, dengan jumlah 925 ribu penduduk. Tetapi areal ibukota ini luasnya sebesar 7.054 km² atau sekitar 160 kali lebih besar daripada Kota Solo yang hanya 44 km². Sehingga sangat jarang, dan banyak pihak menilai pembangunan kota ini mengalami kegagalan.

2. Perkembangan Ibukota: Dari Pemukiman menjadi Kota Padat Penduduk Beserta Infrastruktur nya

Ibukota merupakan pusat pemerintahan dari suatu Negara. Di dalamnya berkedudukan seorang pemimpin eksekutif, yang menjadi kepala pemerintahan. Lembaga legislatif yang mengawasi jalannya pemerintahan, serta yudikatif, lembaga yang berwenang dalam pengawasan berjalannya regulasi. Atau tempat bagi pembuatan keputusan public, dan memiliki pengaruh pada suatu Negara.(Hadi and Ristawati 2020:536) Walaupun pada prakteknya, seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, penyatuan semua unsur pemerintahan dalam "Satu area" bukan lagi dianggap kebutuhan tetap.

Ciri ibukota pada umumnya adalah berada dalam suatu wilayah yang padat penduduk. Di dalamnya terdapat berbagai Hal yang dibutuhkan masyarakatnya. Mereka memiliki

ketersediaan air bersih untuk mereka Konsumsi. Mereka membutuhkan jaringan infrastruktur yang memungkinkan mereka dapat melakukan mobilitas. Sebuah wilayah yang memudahkan mereka mengakses beberapa Hal dengan mudah, termasuk dalam mengakses lembaga pendidikan. Baik untuk menambah literasi mereka maupun tempat pendidikan bagi Putra putri mereka. Semua ini hanya dimungkinkan dalam perkotaan. Semua ibukota Negara berada di perkotaan yang sudah mapan. Seperti Jakarta, Tokyo, Washington, London, Bangkok dan sebagainya.

Batavia sendiri dipilih sebagai ibukota karena ketersediaan banyak bangunan yang bisa digunakan dalam mengatur pemerintahan. Memiliki infrastruktur yang lengkap termasuk infrastruktur pendidikan, akses informasi yang mudah, untuk ukuran waktu itu, dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Walaupun secara historis sudah ada banyak Kota yang berdiri waktu itu. Seperti Surabaya, Semarang, Surakarta, Yogyakarta dan sebagainya.

Semua Kota berasal dari pemukiman kecil terlebih dulu. Kemudian mengembang dan membesar seiring dengan jumlah pendatang yang masuk & menetap ke wilayah tersebut. Selain itu penambahan penduduk juga diakibatkan oleh angka kelahiran yang lebih besar daripada kematian. Karena terdapat kecenderungan orang untuk berkumpul ke suatu tempat yang kondisinya lebih menyenangkan. (Jamaludin 2017:vi)

Pada titik awalnya penduduk mendiami suatu tempat karena kesesuaian dengan lingkungan tempat barunya. Di Jawa dikenal dengan nama babad alas, yang dilakukan oleh beberapa orang. Kemudian beranak pinak menjadi sebuah desa. Dari desa yang nyaman untuk tempat tinggal, menyedot banyak orang untuk bermukim di wilayah itu. Kemudian menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk.

Kepadatan penduduk ini memungkinkan mereka membuat infrastruktur Sederhana secara Mandiri. Seperti jalan & jembatan, serta sistem kepemimpinan di pemukiman. Pada awalnya dipimpin oleh kepala desa yang diangkat secara informal di kalangan mereka, dengan jenis kepemimpinan kharismatik. Seiring dengan masuknya birokrasi modern, maka kepemimpinan dipilih secara legal formal.

Kemajuan teknologi memungkinkan kelengkapan infrastruktur pemukiman. Dengan adanya jalan & jembatan yang mudah dilewati. Pembangunan Rumah yang sebelumnya menggunakan bambu kemudian beralih ke bangunan yang lebih permanen. Menurut Ibn Khaldun Kompleksitas penduduk ini memunculkan Kelas baru, yaitu Kelas Pekerja jasa & pedagang. Hal ini menurutnya berbeda dengan keadaan sebelumnya yang didominasi oleh pekerjaan Alam, Seperti petani dan pemburu. Pertumbuhan pemukiman pada umumnya terjadi secara alami. Berbagai infrastruktur yang Ada karena memang diperlukan untuk penduduk yang sudah tinggal di dalamnya. Termasuk gedung-gedung pemerintahan, baik dalam bentuk istana maupun Kraton. Menurutnya, hal ini merupakan fase dari sebuah peradaban manusia. (Kasdi 2014:291)

Pertumbuhan penduduk dapat Juga dimungkinkan karena adanya ibukota. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah pergantian ibukota di Kerajaan Jawa Masa silam. Misalnya pertumbuhan Kota Solo, berkembang seiring dengan perpindahan pusat kekuasaan dari Kartosuro Menuju desa Sala. Desa Sala waktu itu masih dalam bentuk rawa dan hanya dihuni oleh beberapa orang. Perpindahan dari Kraton Kartosoro Menuju Desa Sala, raja PB II membawa semua prajurit dan abdi dalemnya, beserta pusakanya (Kristiyanto and Yusuf 2019:147). Ini kemudian

mendorong orang-orang untuk berada di dekat pusat kekuasaan. Karena merasakan kenyamanan dibandingkan tempat lainnya. Waktu itu sendiri, lebih dari 90% Pulau Jawa masih berupa alas. Perpindahan penduduk ke pemukiman lebih besar sangat penting. Mengingat adanya perompak ada gangguan dari binatang buas.

Sarana pendidikan pada waktu itu pada umumnya masih dalam pendidikan keluarga. Batik, gamelan, seni tari masih belum bisa diakses oleh masyarakat luas atau di Luar Kraton. Pendidikan di Keluarga, dari fase anak-anak diajarkan cara berkomunikasi. Ketika beranjak dewasa, mereka diajarkan dalam mengelola Mata pencaharian, baik dengan berdagang, beternak atau bertani. Sedangkan pendidikan internal Kraton, para elit bangsawan sudah diajarkan pendidikan kesusastraan, seni, politik dan sebagainya. kemudian, para elit kraton memasuki sekolah yang diadakan oleh Belanda. Karena pihak pemerintahan Belanda, memiliki kepentingan untuk memodernisasi birokrasi kraton. (Lestari 2013:3-4)

Kebutuhan Akan pengetahuan semakin hari semakin kompleks. Ada banyak keahlian yang harus dipilih dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Misalnya dalam kemampuan manajemen birokrasi, kemampuan dalam memahami produk-produk regulasi (yang semakin banyak dan kompleks), kemampuan dalam seni pengobatan, kemampuan dalam pengelolaan keuangan, dan sebagainya. Yang kesemuanya dibutuhkan oleh Negara. Sehingga Negara dapat menggunakan SDM yang dimilikinya.

3. Pembangunan Infrastruktur di Ibukota Negara (IKN) Nusantara

Pemerintahan Jokowi memiliki kebijakan yang khas. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur dengan melibatkan semua sumberdaya, terutama investasi, dalam membangun infrastruktur di Indonesia. Jejak rekam Jokowi dalam pembangunan fisik dengan mengoptimalkan investasi dapat dilihat dari kebijakannya selama menjadi walikota Solo. Misalnya dalam kasus mangkraknya benteng Vastenburg, beliau meminta dukungan swasta untuk mengoptimalkan lahan tersebut, serta menghapus hambatan-hambatan yang dirasa menyulitkan investor (BPKP 2009).

Kebijakan ini kemudian dilanjutkan ketika menjabat sebagai Presiden dalam dua periode. Ia mencabut berbagai hal yang dirasa menjadi kendala dalam berinvestasi. Dalam lawatan ke beberapa Negara, Presiden Jokowi mempromosikan pentingnya investasi di Indonesia. Pembangunan infrastruktur jalan tol, tidak dibangun lewat skema APBN, tetapi menggunakan sumberdaya yang ada di BUMN ataupun swasta. Begitu juga dalam pembangunan kereta cepat, bandara, sertalainnya, lewat Proyek Strategis Nasional. Bahkan dalam sebuah pidato resminya, semua pihak harus mengawal jalannya program pembangunan yang dicanangkan ini. Bahkan beliau sempat ‘mengancam’ para Kapolda yang tidak ikut terlibat dalam mengawal agenda besarnya. (Nurita 2021)

Pembangunan Ibukota Negara (IKN) merupakan salah satu agenda besar presiden. Juga memiliki ciri yang sama dengan pembangunan sebelumnya. yaitu mempercayakan kemitraannya dengan para swasta. Beberapa nama perusahaan terlibat dalam rencana pembangunan ini, terutama yang bergerak di bidang property. Walaupun, wacana pemindahan ibukota sudah sejak lama, bahkan sempat dibahas di era presiden Soekarno dan SBY, tetapi, mereka pada umumnya

bersikap 'realistis' dan tidak terikat dengan kejar tayang waktu dalam menentukan dan membangun ibukota baru. Sehingga pembangunan ibukota Negara ini memang berbeda dengan pembangunan ibukota pemerintahan sebelumnya, yaitu di Jakarta atau Yogyakarta. Dimana manusia beserta SDMnya sudah ada, baru melakukan pembangunan di dalamnya. Sedangkan dalam pembangunan IKN Nusantara ini, infrastrukturnya harus disediakan terlebih dahulu baru kemudian orang-orangnya.

Letak IKN sendiri berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara. Keadaannya masih sangat minim penduduk, dengan jumlah 178 ribu jiwa yang berada di area calon ibukota (BPS 2021). Mereka pada umumnya adalah muslim. Berdasarkan data BPS 2017, jumlah muslim sebesar 159 ribu di antara 168 ribu jumlah total penduduk, sehingga muslim di Penajam Paser Utara sebesar 94%. Mereka pada umumnya, berasal dari suku Jawa, Melayu dan Banjar. Dengan lokasi yang saat ini mayoritas menjadi Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh perusahaan besar. Wilayah ini banyak dipenuhi oleh lubang-lubang raksasa, bekas galian tambang. Sehingga, banyak pihak yang masih meragukan apakah ibukota Negara dapat selesai sampai tahun 2024 mendatang.

Kawasan yang dibangun sebagai calon ibukota baru rencananya akan berada di atas lahan 180 ribu hektar (Antara 2019). Atau hampir tiga kali lipat dari luas Kabupaten Klaten (65 ribu hektar). Sama seperti Kabupaten Klaten, luas ibukota Jakarta sendiri 'hanya' 66 ribu hektar. Untuk pembangunan infrastruktur Ibukota Negara (IKN) baru, membutuhkan penyempurnaan sampai 2045, dengan melewati tiga tahapan. Tahapan pertama selesai pada tahun 2024, dengan pemindahan pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Kalimantan Timur.

Tahapan pertama ini terfokus pada hal-hal yang dianggap substansial bagi adanya pemerintahan. Yaitu istana kepresidenan yang akan menempati areal 100 hektar, dengan dominasi ruang hijau (Fadil 2022). Kemudian areal kantor kementerian yang berada di sekelilingnya. Kemudian, pasokan air dari danau, maupun pembuatan saluran menuju sungai. Serta infrastruktur jalanan, terutama jalan yang menghubungkan kota besar terdekat, yaitu Balikpapan menuju wilayah IKN. Termasuk pembuatan jalan lingkaran (ringroad) sepanjang 5,77 km (Ruhullessin 2022).

Pemerintah juga merencanakan perumahan bagi para ASN (Aparat Sipil Negeri) dan TNI/Polri yang ditempatkan disana, beserta pemukiman umum. Rencananya akan dibuatkan 100 ribu unit, yang akan ditempati oleh 320 ribu penduduk menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Fadil 2021). Dalam reportase di atas, Angka 320 ribu, Mereka terdiri dari keluarga ASN/TNI/Polri dengan jumlah 70% dan untuk kalangan umum sebesar 30%. Semua pemukiman ini akan terisi sampai 20 tahun ke depan.

Dalam berita yang dikemas oleh berbagai media massa, belum dijelaskan secara detail tentang infrastruktur pendidikannya. Berapa sekolah dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi yang akan dibangun, berapa SDM guru yang akan ditempatkan ke ibukota baru, dan sebagainya. Karena planning dari pemerintah baru menjangkau tatanan makro, belum sampai masuk pada detail. Fokus dari rencana pembangunan infrastruktur saat ini adalah bagaimana pemerintah pusat dapat menjalankan tugas pokok fungsinya dengan baik, tanpa memikirkan hal-hal di luar substansi itu.

Termasuk pengadaan taman rekreasi, serta berbagai jenis fasilitas yang dimiliki kota lainnya.

Dari analisa terhadap beberapa media konvensional didapatkan bahwa pemerintah cenderung menggunakan teori pengembangan kota berbasis pada ibukota. Misalnya berita tentang penambahan penduduk yang datang bertambah seiring dengan ditetapkannya Penajam Paser Utara sebagai calon ibukota baru. Atau media konvensional lainnya, yang mengangkat perkiraan bahwa dengan dipindahkannya ibukota, maka infrastruktur pendidikan semakin merata di tanah air. Dengan asumsi bahwa pertumbuhan lembaga pendidikan juga akan meningkat di suatu daerah yang berada relatif dekat dengan pusat kekuasaan.

4. Perkiraan Kasar Kebutuhan Pendidikan di IKN Nusantara

a. Perkiraan Jumlah Penduduk dan Jumlah Wajib Belajar

Pertumbuhan sebuah organisasi usaha baik profit ataupun *nonprofit* biasanya mengikuti pola perkembangan penduduk. Misalnya, minimnya jumlah tukang cukur di wilayah padat penduduk, secara otomatis mendorong orang untuk mendirikan tempat cukur baru, ini hanya sebagai contoh kecil yang mudah dipahami. begitu juga, banyaknya penduduk di suatu tempat, pasti memungkinkan sekelompok orang untuk mendirikan lembaga pendidikan, dari tingkat Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi.

Perkiraan jumlah ASN dan umum yang ditempatkan di IKN sampai 2045 sejumlah 320 ribu. Dari jumlah ini, akan mendorong pihak swasta atau mungkin negeri untuk menyediakan sarana pendidikan. Karena swasta memiliki kemampuan dan kemandirian untuk mendirikan lembaga pendidikan. Semakin banyaknya penduduk yang mendiami suatu wilayah, maka memungkinkan pembukaan jasa, sehingga tercipta varietas pekerjaan dalam suatu wilayah. Ini yang menjadi teori pengembangan diversitas usaha oleh Ibn khaldun, yang menjadi ukuran kemajuan sebuah peradaban.

Menurut data BPS, jumlah partisipasi penduduk muda di sekolah tergolong sangat tinggi. Untuk usia 7-12 tahun, partisipasinya sebesar 99,22%, sedangkan untuk usia 13-15 tahun sebesar 96,36%, untuk usia 16 – 18 tahun sebesar 71,99%, dan rentang usia 19-24 tahun sebesar 24,40%. Sedangkan untuk keseluruhan usia 7 sampai 24 tahun sebesar 70,71% (BPS 2021). Angka demikian adalah usia anak muda 7-24 yang masih beraktivitas di sekolah (dari SD hingga perguruan tinggi). Ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

PNS dan anggota Polri dan TNI yang dipekerjakan di IKN Nusantara, memiliki keluarga. Pada umumnya mereka berusia lebih dari 25 tahun, dan sebagian besar membawa pasangan dan anak-anaknya. Bahkan kementerian PUPR, menyatakan akan membangun perumahan bagi para aparatur Negara yang dipekerjakan, beserta keluarga mereka. Artinya mereka juga membawa anak-anak usia wajib belajar yang harus ikut.

Menentukan seberapa besar sarana yang dibutuhkan oleh IKN untuk menampung peserta didik juga dapat dilihat dari table perbandingan antara jumlah anak muda usia sekolah sampai mahasiswa, dengan jumlah keseluruhan penduduk. Perbandingan skala nasional, dapat dilihat dari table berikut ini (BPS 2019);

Table I. Persentase Kelompok Usia dengan Keseluruhan Penduduk Indonesia (dalam hitungan ribu)

5-9 tahun	23 973,8	8,9%
10- 14 tahun	23 057,1	8,6%
15 -19 tahun	22 294,2	8,3%
20-24 tahun	21 917,6	8,1%
		33,9%

Data di atas memperlihatkan usia seseorang menempuh pendidikan dari TK hingga S-1. Jika jumlah penduduk di IKN sesuai dengan rencana pemerintah yaitu 320 ribu, maka jumlah usia sekolah sebesar 108 ribu orang, dari TK hingga perguruan tinggi. Sedangkan menurut Badan Kepegawaian Nasional (BKN) rasio jumlah guru dan siswa di DKI Jakarta sendiri sejumlah 0,2 (BKN 2017), sehingga perkiraan kebutuhan guru sebesar 2% dari total siswa, sehingga setidaknya ada 2.000 guru dari berbagai jenjang pendidikan yang ditempatkan di IKN Nusantara. Sedangkan jika mengukur menggunakan rasio ideal, yaitu jumlah 1 banding 18, maka didapatkan angka 6 ribu tenaga pengajar (guru dan dosen) bagi 108 pelajar dan mahasiswa.

Para putra dari aparaturnya Negara pada umumnya memasuki bangku sekolah hingga perguruan tinggi. Karena minat akan pendidikan tinggi, lebih besar daripada rata-rata penduduk Indonesia. Dorongan menyekolahkan anak berfungsi untuk memberikan bekal pengetahuan dan relasi akademis pada putra-putri mereka. Sehingga, mereka juga memikirkan bagaimana cara mengakses pendidikan bagi putra-putrinya berkualitas. Pemerintah perlu menyediakan SDM tenaga pengajar sesuai dengan ekspektasi (harapan) dari para calon wali, yang kebanyakan dari latar belakang TNI, Polri dan ASN.

Sampai saat ini belum ada diskusi yang sudah dituangkan dalam road map yang memuat rencana infrastruktur pendidikan, dari SD hingga perguruan tinggi. Pemerintah memfokuskan bagaimana mengembangkan suatu wilayah dengan kekuatan investasi. Sedangkan sekolah didirikan oleh lembaga non profit. Sangat mungkin, pada tahap selanjutnya, juga akan melibatkan berbagai organisasi non laba, termasuk organisasi islam, untuk mengembangkan pendidikan di wilayah IKN. Presiden Jokowi sendiri menjanjikan akan memberikan lahan konsesi besar kepada PBNU (Nugraheny 2022), yang sangat mungkin akan didirikan Pondok Pesantren maupun Madrasah.

Jumlah pasti penduduk yang ditempatkan masih berupa perkiraan kasar. Semuanya masih dalam bentuk wacana dan rencana program, atau memperkirakan jumlah anggaran yang harus dikeluarkan oleh Negara. Permasalahan lainnya dalam estimasi (perkiraan jumlah) adalah keengganan para aparaturnya yang akan ditempatkan disana. Karena belum adanya banyak fasilitas, dan masih berupa pemukiman jarang penduduk dan masih berupa proses pembangunan yang sangat panjang.

b. Penyediaan Sarana Pendidikan

Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara juga memiliki sejumlah infrastruktur pendidikan terlebih dahulu. Tetapi infrastruktur pendidikan ini hanya cukup untuk penduduk yang sudah ada sebelumnya, dan tersebar di banyak titik. Pengadaan penduduk di wilayah IKN memerlukan pembangunan infrastruktur pendidikan lagi, sehingga terdapat

kesesuaian antara permintaan akan fasilitas pendidikan, dengan daya dukungnya.

Sarana pendidikan bisa diperkirakan lewat rasio antara perkiraan jumlah pelajar dengan jumlah kelas. Jika jumlah usia sekolah sekitar 108 ribu, dari berbagai kelompok umur, maka jumlah penyediaan jumlah kelas, disesuaikan dengan jumlah di atas sesuai dengan jenjang pendidikan.

Secara ideal jumlah perbandingan kelas dengan murid adalah 1:25 (Mubarak 2019:528). Atau 1 ruang kelas yang diisi oleh 25 siswa. Jika ada 108 ribu, dengan asumsi bahwa hampir semua kelompok umur tersebut aktif di sekolah di semua jenjang, maka setidaknya memerlukan 4.320 ruang kelas untuk semua jenjang. Tugas pemerintah dan swasta adalah menyediakan fasilitas belajar bagi para penduduk IKN Nusantara. Karena tiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Apalagi status warga Negara tersebut tercantum sebagai ASN atau anak dari anggota Polri dan anggota TNI (Maksum, dkk. 2021, 207).

Penyediaan semua Ruang itu perlu adanya kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta, baik umum ataupun keagamaan. Sekolah dapat berupa sekolah negeri, Madrasah Negeri, Sekolah Swasta, Madrasah Swasta, dan SMK. Dan tiap sekolah, idealnya memiliki fasilitas yang diperlukan sebagaimana sekolah pada umumnya. misalnya sarana olahraga, laboratorium, dan perpustakaan. Dalam hal laboratorium di sekolah, perlu ada beberapa lab, seperti laboratorium untuk IPA dan laboratorium untuk komputer.

Pengelolaan laboratorium perlu mempekerjakan orang yang memiliki skill dalam mengelola laboratorium, sehingga perlu menyediakan ribuan tenaga laboratorium. Sedangkan standart untuk perpustakaan, maka minimal ada 4 ribu judul buku dalam tiap laboratorium, dapat dibayangkan perlu pengadaan ratusan ribu buku, untuk menyiapkan SDM yang handal di ibukota. Serta permbangunan lingkungan Sekolah yang layak. Untuk menuju kea rah ini, memang sangat sulit. Karena perkembangan sekolah di perkotaan sendiri, banyak yang dijalankan selama ini jauh dari ideal.

KESIMPULAN

Pemindahan Ibukota merupakan hal yang sering terjadi jika menengok sejarah. Pada umumnya pemindahan ibukota di masa lampau, karena stabilitas pemerintahan, baik aman dari gangguan bencana maupun aman dari gangguan musuh. Sedangkan pemindahan ibukota saat ini pada umumnya untuk menghindari dari kemacetan dan kepadatan di ibukota lama.

Pada masa lampau, perpindahan ibukota selalu diiringi dengan penambahan penduduk dengan jumlah berlimpah (seperti kasus Baghdad, Surakarta, dan Yogyakarta), tetapi pada masa sekarang diikuti dengan penambahan jumlah penduduk yang relatif rendah (seperti kasus di Naypytaw-Myanmar, Petrajaya- Malaysia). Bahkan dalam perkembangan infrastruktur pendidikan, Baghdad di masa dinasti Abbasiyah mampu mengembangkan peradaban ilmu pengetahuan. Keberhasilan pemindahan ibukota di masa lampau, tidak selamanya berkorelasi dengan keberhasilan di masa sekarang, Karena konteks sosial antara masa lampau dengan masa sekarang yang jauh berbeda.

Dalam hal pembangunan infrastruktur, pemerintah sampai saat ini masih fokus pada pembangunan infrastruktur inti, yaitu berupa kantor dan gedung kepresidenan dan pemerintahan, dan menyediakan perumahan bagi para aparaturnya Negara (ASN, Polri dan TNI), dan belum membuat rencana tentang

pengembangan sekolah. Dengan jumlah tahap awal pembangunan disediakan 100 ribu perumahan, dengan perkiraan 320 ribu penduduk (bersumber dari Kementerian PUPR)

Perhitungan jumlah diatas, maka perkiraan jumlah usia belajar dari TK hingga perguruan tinggi sebesar 108 ribu siswa. Angka ini didapatkan dari persentase jumlah kelompok usia 7 hingga 24 tahun dikali jumlah 320 ribu. Sehingga, kebutuhan infrastuktur mengikut angka tersebut, yaitu lebih dari 4.320

DAFTAR PUSTAKA

Andreastuti, Supriati. 2006. "Menelusuri Kebenaran Letusan Gunung Merapi 1006." *Indonesian Journal On Geoscience*. Doi: 10.17014/Ijog.Vol1no4.20064.

Antara. 2019. "Ibu Kota Baru, Jokowi: Lahan Pemerintah 180 Ribu Hektar." *Tempo.Co*.

Bangun, Budi Hermawan. 2019. "Perbandingan Sistem Dan Mekanisme Ham Negara-Negara Anggotaasean: Tinjauan Konstitusi Dan Kelembagaan." *Jurnal Ham* , 10(1). Doi: <http://dx.doi.org/10.30641/Ham.2019.10.99-113>.

Bisri, Mashur Hasan. 2017. "Kontrol Politik Birokrasi Dalam Kebijakan Publik." *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 2(2).

Bkn. 2017. "<https://www.bkn.go.id/rasio-guru-dan-murid-per-provinsi>."

Bpkp. 2009. "Bpkp Jateng Tuntaskan Kasus Hkp Benteng Vasternburg Solo." *Bpkp Jawa Tengah*, July 14.

Bps. 2019. "Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin, 2019."

Bps. 2021. "Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2020."

Bps. 2021. "Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, Dan Partisipasi Sekolah., 2002-2021."

Dewi, Friska Candra, And Ufi Saraswati. 2019. "Perkembangan Arsitektur Pada Masa Kolonial Di Surakarta Tahun 1900-1942: Tinjauan Politik, Sosial Dan Pendidikan." 9.

Fadil, Ardiansyah. 2021. "Sejumlah 100.000 Rumah Akan Dibangun Di Ikn, Untuk Siapa Saja?" *Kompas*.

Fadil, Ardiansyah. 2022. "Luas Kompleks Istana Garuda Di Ikn Jadi 100 Hektar, Untuk Apa Saja?" *Kompas*.

Hadi, Fikri, And Rosa Ristawati. 2020. "Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dan Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* , 17(3). Doi: <https://doi.org/10.31078/Jk1734>.

Indraini, Anisa. 2022. "500 Ribu Pns Pindah Duluan Ke Ibu Kota Baru, Catat Waktunya!" *Detik Finance*, January 17.

Jamaludin, Adon Nasrullah. 2017. *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota Dan Problematikanya*. Bandung: Pustaka Setia.

Kasdi, Abdurrahman. 2014. "Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Sosiologi Dan Filsafat Sejarah." 2(1):17.

Kristiyanto, Dani Eko, And Syafruddin Yusuf. 2019. "Abdi Dalem Keraton Surakarta Hadiningrat Tahun 2004-2014." 7.

ruang kelas, dengan asumsi 1 kelas 25 orang. jumlah ruangan kelas ini perlu diadakan oleh pemerintah yang berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan, baik umum ataupun keagamaan. Sedangkan untuk pengadaan madrasah dan pesantren, mengikuti jumlah permintaan dari penduduk, yaitu seberapa banyak dari jumlah para peserta didik memiliki minat di bidang keagamaan. Dan biasanya pertambahan kelas dalam suatu lembaga pendidikan ditentukan oleh seberapa besar mereka dapat menampung siswa.

Lestari, Widi Indah. 2013. "Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Mengenai Pendidikan Bagi Kaum Bangsawan Di Indonesia Tahun 1900-1920." *Pesagi* 1(2):13.

Maksum, Mnr, D Ramdhani, M Fatimah, At Nisa. 2021. Realizing Democratic Education Through The Development Of Pesantren Education Process - Profetika: Jurnal Studi Islam.

Mubarak, Zaki. 2019. *Sistem Pendidikan Di Negeri Kangguru: Studi Komparatif Australia Dan Indonesia*. Depok: Gending Pustaka.

Nugraheny, Dian Erika. 2022. "Jokowi: Untuk Nu Tidak Mungkin Saya Beri Konsesi Yang Kecil, Pasti Yang Gede." *Kompas*.

Nurita, Dewi. 2021. "Jokowi Ancam Copot Kapolda Yang Tak Bisa Kawal Investasi Dan Penanganan Covid-19." *Tempo Nasional*.

Permana, Rakhmad Hidayatulloh Rakhmad Hidayatulloh. 2021. "Kapan Ibu Kota Negara Pindah Ke Kaltim? Ini Jawabannya Di Ruu Iknkapan Ibu Kota Negara Pindah Ke Kaltim? Ini Jawabannya Di Ruu Ikn." *Detik News*.

Rahadian, Aristya. 2022. "Sepi & Jadi 'Kota Hantu', Wajah Ibu Kota Baru 2 Tetangga Ri." *Cnbc Indonesia*, January 21.

Ruhlessin, Masya Famely. 2022. "Deretan Infrastruktur Yang Akan Dibangun Di Ikn Nusantara." *Kompas*.

Sembiring, Lidya Julita. 2022. "Terungkap! Bangun Ibu Kota Baru Mayoritas Bakal Pakai Apbn." *Cnbc Indonesia*, January 17.

Usamah. 2019. "Transformasi Islam Dari Demak Hingga Mataram." Uin Sunan Ampel, Surabaya.

Zakariya, Din Muhammad. 2018. *Sejarah Peradaban Islam: Prakenabian Hingga Islam Di Indonesia*.